

Tindakan Preventif Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Mencegah Vandalisme dan Pencurian Koleksi

Anindya Deanova Prasetyorini¹, Nuraini Perdani^{1*}

¹Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

*Korespondensi: nurainiperdanisp@lecturer.undip.ac.id

Abstract

[Preventive Actions of the Central Java Provincial Library in Preventing Vandalism and Theft of Collections]

This study aims to analyze the preventive measures implemented by the Central Java Provincial Library in an effort to prevent vandalism and theft of collections. Damage and loss of collections are common problems in libraries, especially in collections with high utilization rates. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of librarians and security officers who have a direct role in supervising and managing library collections. The results showed that the most common forms of vandalism included scribbling, folding pages, and tearing books. Meanwhile, cases of collection theft were found to be relatively low, which was influenced by the implementation of an adequate security system. Preventive measures taken include the implementation of rules and regulations, the installation of information boards, the use of security technology such as CCTV and RFID, and a policy of using lockers to limit the items that library users can bring in. CCTV serves as a means of visual monitoring as well as psychological deterrence, while RFID helps detect collections that are taken out without going through the official borrowing procedure. In addition, the library also implements special collection room management with access restrictions and staff assistance. The obstacles encountered include limited human resources, suboptimal CCTV coverage, and low awareness among library users. Overall, the preventive measures implemented have been quite effective but still require strengthening in terms of supervision and user education.

Keywords: preventive measures; library security; vandalism; collection theft; CCTV; RFID.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan preventif yang diterapkan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mencegah vandalisme dan pencurian koleksi. Kerusakan dan kehilangan koleksi merupakan permasalahan yang umum terjadi di perpustakaan, terutama pada koleksi dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pustakawan dan petugas keamanan yang memiliki peran langsung dalam pengawasan serta pengelolaan koleksi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk vandalisme yang paling sering terjadi meliputi coretan, lipatan halaman, dan robekan buku. Sementara itu, kasus pencurian koleksi ditemukan dalam jumlah yang relatif rendah, yang dipengaruhi oleh penerapan sistem keamanan yang cukup memadai. Tindakan preventif yang dilakukan meliputi penerapan tata tertib, pemasangan papan informasi, penggunaan teknologi keamanan seperti CCTV dan RFID, serta kebijakan penggunaan loker untuk membatasi barang bawaan pemustaka. CCTV berfungsi sebagai sarana pemantauan visual sekaligus pencegahan psikologis, sedangkan RFID membantu mendeteksi koleksi yang keluar tanpa melalui prosedur peminjaman resmi. Selain itu, perpustakaan juga menerapkan pengelolaan ruang koleksi khusus dengan pembatasan akses dan pendampingan petugas. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan CCTV yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran pemustaka. Secara keseluruhan, tindakan preventif yang diterapkan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan edukasi pemustaka.

Kata kunci: tindakan preventif; keamanan perpustakaan; vandalisme; pencurian koleksi; CCTV; RFID.

1. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan institusi yang berperan penting dalam menyediakan dan mengelola sumber informasi bagi masyarakat. Secara umum, perpustakaan dapat dipahami sebagai suatu gedung atau ruang yang difungsikan untuk menyimpan buku dan berbagai terbitan lainnya yang ditata berdasarkan ketentuan tertentu agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi. Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku untuk mendukung pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Sementara itu, Sulisty-Basuki (1991) mendefinisikan perpustakaan sebagai ruangan, bagian dari gedung, atau gedung tersendiri yang digunakan untuk menyimpan bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan dimanfaatkan oleh pembaca, bukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat perpustakaan terletak pada fungsinya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk perpustakaan umum, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat secara luas tanpa dipungut biaya. Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh perpustakaan adalah koleksi, baik berupa buku teks, terbitan berkala seperti koran dan majalah, maupun koleksi khusus seperti naskah kuno dan koleksi sejarah. Namun, dalam praktiknya, koleksi perpustakaan sangat rentan mengalami kerusakan dan kehilangan akibat perilaku pemustaka yang tidak bertanggung jawab. Bentuk kerusakan tersebut antara lain vandalisme berupa coretan, perobekan halaman, mutilasi koleksi, 1 2 hingga pencurian bahan pustaka. Fenomena pencurian dan perusakan koleksi di perpustakaan sering kali diibaratkan seperti fenomena gunung es, di mana jumlah kehilangan koleksi yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tercatat secara administratif. Tindakan vandalisme dan pencurian koleksi membawa dampak negatif yang signifikan, seperti menurunnya citra perpustakaan, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta timbulnya ketidakpuasan pemustaka akibat informasi yang tidak lagi tersaji secara utuh (Fatmawati, 2010). Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan koleksi merupakan aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola perpustakaan.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif melalui penerapan sistem keamanan perpustakaan yang efektif. Sistem keamanan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan perpustakaan karena berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi pustakawan, pemustaka, serta koleksi yang dimiliki. Perpustakaan dituntut untuk membangun sistem keamanan yang mampu melindungi gedung, sumber daya manusia, dan bahan pustaka dari berbagai bentuk ancaman. Dengan adanya sistem keamanan yang memadai, potensi terjadinya tindakan vandalisme dan pencurian koleksi diharapkan dapat diminimalkan sehingga kegiatan layanan perpustakaan dapat berjalan dengan optimal. Fatmawati (dalam Nuansa, 2019) mengemukakan bahwa upaya pencegahan pencurian koleksi di perpustakaan dapat dilakukan melalui dua bentuk pengamanan, yaitu pengamanan fisik dan pengamanan berbasis sistem. Pengamanan fisik meliputi

pembatasan barang bawaan pemustaka, pemeriksaan di pintu keluar, serta kehadiran petugas keamanan. Sementara itu, pengamanan berbasis sistem dilakukan dengan memanfaatkan teknologi keamanan seperti pemasangan perangkat pengaman pada koleksi. Selain itu, Barokah dan Azhar (2024) menyatakan bahwa perilaku tidak tertib pemustaka, seperti pengembalian buku yang tidak sesuai rak, pencoretan, kelalaian dalam menangani bahan pustaka, hingga pencurian, menjadi salah satu penyebab utama kerusakan koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, tindakan preventif tidak hanya berupa penerapan teknologi, tetapi juga mencakup edukasi pengguna, peningkatan pengawasan, dan penegakan aturan yang jelas. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan berbagai bentuk sistem keamanan sebagai tindakan preventif untuk melindungi koleksi, di antaranya pemasangan CCTV, Security Gate, RFID, dan Barcode. CCTV digunakan untuk memantau aktivitas pengunjung dan staf di area strategis perpustakaan, sementara Security Gate berfungsi mendeteksi koleksi yang keluar tanpa melalui prosedur peminjaman. Teknologi RFID dan Barcode dimanfaatkan untuk mendukung proses inventarisasi, pelacakan, serta pengelolaan koleksi secara lebih efektif.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan keterangan pustakawan, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti koleksi yang tidak lagi utuh akibat vandalisme serta kehilangan koleksi yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian, tidak dikembalikannya buku, hingga pencurian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem keamanan telah diterapkan, efektivitas tindakan preventif yang dilakukan masih perlu dikaji lebih lanjut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara mendalam tindakan preventif yang dilakukan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah vandalisme dan pencurian koleksi. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rusnianasari, Agustina, dan Rusmono (2020), menunjukkan bahwa kerusakan koleksi dipengaruhi oleh kurangnya pengamanan, kelalaian pemustaka, dan rendahnya rasa memiliki terhadap perpustakaan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji tindakan preventif dalam konteks perpustakaan provinsi sebagai perpustakaan umum dengan karakteristik pemustaka yang heterogen. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih kontekstual mengenai upaya preventif yang dilakukan serta menilai peran sistem keamanan dalam melindungi koleksi perpustakaan sebagai aset penting layanan informasi publik.

2. Landasan Teori

Sistem keamanan merupakan rangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi suatu organisasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan keberlangsungan aktivitas. Menurut KBBI, sistem keamanan mencakup penggunaan teknologi, peraturan, serta pelatihan personel untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons situasi yang berpotensi membahayakan. Dalam konteks perpustakaan, sistem keamanan dikenal sebagai Library Security System, yaitu perangkat terpadu yang terdiri atas komponen-komponen listrik yang saling terhubung secara teratur dan terintegrasi dengan sistem alarm (Proyogo, 2015). Sistem ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman

eksternal, baik berupa pencurian maupun kerusakan koleksi, serta mencegah timbulnya gangguan dan potensi bahaya lainnya (Mustofa, 2015).

Pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam sistem keamanan perpustakaan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Radio Frequency Identification (RFID), yang memungkinkan otomatisasi layanan sirkulasi dan pengelolaan koleksi, termasuk peminjaman, pengembalian, inventarisasi, dan pelacakan bahan pustaka (Caldwell & Stone, 2010). Melalui RFID, pustakawan dapat melakukan pemantauan koleksi secara lebih akurat, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala biaya yang relatif tinggi. Selain RFID, penggunaan kamera Closed Circuit Television (CCTV) juga berperan penting dalam mendukung keamanan perpustakaan. CCTV dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pengguna dan staf serta merekam kejadian yang berpotensi mengancam keamanan koleksi. Kumar (2014) menyatakan bahwa sistem pengawasan CCTV digunakan untuk menjaga koleksi dari tindakan pencurian dan mutilasi, sekaligus berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap perilaku menyimpang.

Kerusakan koleksi perpustakaan yang disebabkan oleh manusia merupakan salah satu tantangan utama dalam pelestarian bahan pustaka. Faktor manusia dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan fisik hingga kehilangan koleksi secara permanen, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran layanan dan meningkatkan beban biaya pemeliharaan perpustakaan (Fatmawati, 2018). Sulistyio-Basuki (1991) menjelaskan bahwa perilaku pengguna yang tidak mengikuti etika pemanfaatan koleksi dapat menyebabkan kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat. Salah satu bentuk kerusakan yang sering terjadi adalah vandalisme, seperti mencoret, menandai halaman, melipat sudut buku, atau merobek bagian tertentu dari bahan pustaka. Tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan permanen yang menurunkan nilai informasi, estetika, serta usia pakai koleksi (Sulistyio-Basuki, 1991). Soeatminah (1992) menambahkan bahwa vandalisme umumnya muncul akibat rendahnya kesadaran pemustaka dalam menghargai bahan pustaka sebagai sumber informasi bersama.

Selain vandalisme, pencurian koleksi merupakan bentuk kerusakan paling serius karena menyebabkan hilangnya bahan pustaka secara keseluruhan. McComb (2004) menjelaskan bahwa pencurian koleksi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti membawa pulang buku tanpa prosedur peminjaman resmi atau mengambil bagian tertentu dari bahan pustaka. Pencurian sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan dan minimnya sistem keamanan perpustakaan. Soeatminah (1992) menegaskan bahwa kehilangan koleksi menimbulkan kerugian besar bagi perpustakaan karena tidak semua bahan pustaka dapat diganti, baik karena keterbatasan ketersediaan maupun tingginya harga. Yuliana, Purwaka, dan Sa'diyah (2020) menyebutkan bahwa vandalisme, mutilasi, dan pencurian termasuk dalam bentuk *bibliocrime* yang dapat mengganggu layanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan. Perubahan karakter perpustakaan modern yang semakin terbuka dan ramah pengguna juga berpotensi meningkatkan risiko pencurian apabila tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai (Cravey, 2001).

Tindakan preventif perpustakaan merupakan upaya sistematis untuk mencegah terjadinya vandalisme dan kehilangan koleksi sebelum kerugian tersebut terjadi. IFLA (1999) mendefinisikan pencegahan kerusakan koleksi sebagai serangkaian upaya yang mencakup pelestarian bahan pustaka, dukungan finansial, ketersediaan sumber daya manusia, penerapan metode yang tepat, serta pengelolaan penyimpanan koleksi secara baik. Pemanfaatan teknologi keamanan seperti RFID, barcode, dan CCTV menjadi bagian penting dalam tindakan preventif perpustakaan (Syaikhu, 2011). Higgins (2015) menegaskan bahwa pencegahan vandalisme dan pencurian koleksi harus dilakukan melalui pendekatan keamanan berlapis yang mengombinasikan kebijakan institusi, pengamanan fisik, pemanfaatan teknologi, serta peran aktif pustakawan. Dengan pendekatan terpadu tersebut, perpustakaan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan koleksi sekaligus meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif informan terkait tindakan preventif perpustakaan dalam mencegah vandalisme dan pencurian koleksi (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menafsirkan fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dan menekankan proses serta konteks penelitian (Nasution, 2023). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif, dengan fokus pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai sistem yang terikat (*bounded system*). Studi kasus dipandang relevan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sistem keamanan perpustakaan diterapkan dalam upaya pencegahan kerusakan dan kehilangan koleksi (Creswell, 2013). Unit analisis penelitian ini adalah tindakan preventif perpustakaan dalam melindungi koleksi dari vandalisme dan pencurian.

Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap sistem keamanan dan pengelolaan koleksi (Sugiyono, 2010). Informan utama adalah pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif (Wekke, 2019). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas guna memastikan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

Penelitian ini menghasilkan tujuh tema utama terkait tindakan preventif Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah vandalisme dan pencurian koleksi, yaitu kebijakan, regulasi keamanan, pemanfaatan teknologi keamanan CCTV dan RFID, pengawasan petugas atau sumber daya manusia,

prosedur pengamanan barang pengunjung, edukasi serta orientasi pengguna, tantangan serta keterbatasan, evaluasi dan tindak lanjut.

4.1.1. Kebijakan dan Regulasi Keamanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kebijakan dan regulasi keamanan tertulis yang menjadi dasar dalam pengelolaan keamanan koleksi. Kebijakan tersebut tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) dan mengatur berbagai aspek penggunaan layanan perpustakaan. Regulasi ini mencakup larangan membawa tas tertentu ke ruang koleksi, pembatasan akses terhadap koleksi khusus, serta pemberian informasi dan peringatan kepada pemustaka melalui berbagai media. Hal ini juga dikatakan oleh pustakawan saat wawancara:

“Baik jadi satu yang pertama yaitu tata tertib ada terkait itu, sudah di ada di kartu KTA ada larangan untuk corat-coret dan sebagainya” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain aturan tertulis, perpustakaan juga menempatkan berbagai papan peringatan di ruang layanan agar pemustaka tetap mengingat etika penggunaan koleksi:

“Pemasangan informasi itu ada di papan informasi... beberapa spot kita pasang di ruang layanan dewasa.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Pustakawan menjelaskan bahwa kebijakan dan regulasi keamanan tersebut diterapkan sebagai bentuk tindakan preventif perpustakaan dalam mencegah terjadinya vandalisme dan pencurian koleksi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban bagi pemustaka untuk menyimpan barang bawaan tertentu, seperti tas, di loker yang telah disediakan sebelum memasuki ruang koleksi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan barang pribadi dalam menyembunyikan atau merusak koleksi perpustakaan.

“Untuk tas memang harus ditaruh di loker, yang boleh dibawa masuk hanya barang-barang tertentu saja. Tapi barang seperti laptop itu bisa dibawa masuk, karena kita juga menyediakan spot pengecasan jadi barang-barang tertentu saja yang dapat di bawa masuk.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain itu, Pustakawan juga menjelaskan bahwa pengelolaan koleksi dilakukan dengan menerapkan pembatasan pemanfaatan terhadap koleksi tertentu, seperti koleksi referensi dan koleksi lama, yang hanya dapat digunakan di tempat dan tidak diperbolehkan untuk dipinjam. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kondisi fisik koleksi agar tetap terpelihara serta mengurangi risiko kehilangan.

“Ada namanya ruangan referensi itu tidak bisa dipinjam, ada juga namanya koleksi cetak media rekam itu kan hasil dari penerbit harus diserahkan kepada perpustakaan provinsi, itu kita sediakan khusus, dan ada koleksi kuno itu kita buat display, dan juga koran lama yang aksesnya itu hanya bisa dibaca di tempat, jadi harus ada petugas dulu di damping petugas.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penyimpanan barang pengunjung dan pengelolaan koleksi merupakan bagian dari regulasi keamanan yang saling mendukung dalam upaya pencegahan vandalisme dan pencurian koleksi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

4.1.2. Pemanfaatan Teknologi Keamanan CCTV dan RFID

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menerapkan berbagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya vandalisme dan pencurian koleksi. Upaya pencegahan ini mencakup aturan tertulis, pemanfaatan teknologi keamanan, serta pengawasan langsung oleh petugas. Dari seluruh strategi yang digunakan, penggunaan CCTV dan RFID menjadi bentuk pengamanan paling dominan karena berfungsi sebagai alat deteksi, pengawasan, dan dokumentasi yang tidak dapat dilakukan secara manual oleh petugas. Pemanfaatan CCTV menjadi komponen pengamanan utama di perpustakaan. Kamera ditempatkan di setiap ruangan untuk memantau aktivitas pemustaka, terutama pada area yang tidak dapat diawasi secara langsung oleh petugas. CCTV berfungsi tidak hanya sebagai alat pemantauan visual, tetapi juga sebagai dokumentasi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan koleksi. Pustakawan menjelaskan tentang penggunaan CCTV:

“Semua ruangan ada CCTV, tapi karena masih terbatas, satu CCTV mencakup ruangan yang agak luas. Sudah ada penambahan 8 CCTV di gedung baru.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

CCTV merupakan salah satu instrumen keamanan yang memiliki peran penting dalam tindakan preventif perpustakaan. Dengan jangkauan pengawasan yang luas, keberadaan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau aktivitas pengunjung, tetapi juga memberikan efek pencegahan secara psikologis. Pengguna perpustakaan cenderung lebih berhati-hati dalam bersikap ketika mengetahui bahwa area yang mereka masuki diawasi oleh kamera. Selain itu, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti visual apabila terjadi tindakan pelanggaran, seperti vandalisme atau upaya pencurian, sehingga mempermudah proses identifikasi pelaku secara cepat dan akurat. Fungsi dokumentasi ini sangat penting dalam mendukung penanganan kasus dan evaluasi keamanan. Selain CCTV, perpustakaan juga memanfaatkan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) yang terintegrasi dengan alarm gate pada pintu keluar. Sistem RFID menjadi salah satu perangkat keamanan paling efektif dalam mencegah pencurian koleksi karena bekerja melalui deteksi otomatis. Setiap bahan pustaka telah dilengkapi dengan tag RFID yang akan terbaca oleh sensor ketika melewati gate. Jika koleksi dibawa keluar tanpa melalui prosedur peminjaman, sistem akan memberikan peringatan berupa bunyi alarm. Mekanisme ini tidak hanya mengurangi potensi kehilangan koleksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja pustakawan dalam melakukan pemantauan, karena proses pengawasan menjadi lebih terstruktur dan tidak sepenuhnya bergantung pada pengawasan manual. Dengan demikian, kombinasi antara CCTV dan RFID mampu membentuk ekosistem keamanan yang lebih komprehensif dan responsif dalam mendukung upaya preventif perpustakaan. Sebagaimana dijelaskan pustakawan:

“Untuk RFIDnya kan berkaitan dengan keluar masuk, untuk vandalisme tidak terdeteksi. Itu hanya berkaitan dengan koleksi yang keluar dan masuk, apakah statusnya sudah di pinjam atau belum, terkait hilang dan tidaknya tapi kalau kerusakan tidak terdeteksi” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

sehingga kedua teknologi tersebut saling melengkapi dalam mendukung tindakan preventif perpustakaan. Sistem RFID yang digunakan saat ini telah mengalami pembaruan dengan menggunakan stiker RFID pada koleksi.

“Sekarang RFID-nya pakai stiker, jadi kalau buku belum dipinjam tapi dibawa keluar, alarm RFID langsung berbunyi.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain memanfaatkan teknologi keamanan, perpustakaan juga menerapkan strategi pengelolaan ruang koleksi sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko vandalisme dan pencurian. Pengaturan ruang seperti ini memberikan perlindungan tambahan karena membatasi kontak langsung dengan koleksi yang sifatnya langka, historis, atau bernilai tinggi, sehingga peluang terjadinya pencurian maupun tindakan merusak dapat diminimalkan. Kebijakan ruang tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap bagi sistem keamanan berbasis teknologi seperti CCTV dan RFID, menjadikan perlindungan koleksi lebih komprehensif melalui kombinasi pendekatan fisik, prosedural, dan teknologi.

4.1.3. Pengawasan Petugas dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan aktif oleh petugas dan satpam berperan penting dalam upaya pencegahan vandalisme dan pencurian koleksi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pengawasan ini dilakukan secara langsung melalui kehadiran petugas layanan dan satpam di area perpustakaan, khususnya pada ruang dewasa dan area layanan lainnya, sehingga aktivitas pemustaka dan penggunaan koleksi dapat terpantau secara berkelanjutan. Satpam berjaga selama 24 jam dan memiliki akses terhadap pemantauan CCTV sebagai bagian dari sistem pengawasan terpadu. Pengawasan oleh satpam tidak hanya berfokus pada keamanan fisik gedung, tetapi juga pada pengendalian aktivitas keluar-masuk serta pemantauan kondisi ruang layanan melalui sistem kamera.

“Iya, karena secara tidak langsung selama 24 jam yang menjaga itu kan satpam, terus memang ada TV monitornya terkait dengan titik-titik CCTV yang ada.kami juga bisa memantau kondisi melalui CCTV.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh petugas layanan yang berjumlah tiga orang di ruang dewasa dan bertugas secara bergilir. Kehadiran petugas di ruang layanan memungkinkan adanya pengawasan langsung terhadap perilaku pemustaka serta pemberian teguran apabila ditemukan tindakan yang berpotensi mengarah pada vandalisme atau pelanggaran tata tertib.

“Khususnya di ruang dewasa ya, karena paling banyak pengunjungnya itu di ruang dewasa. Jadi di sana itu ada tiga petugas, ketika satu sedang melakukan pengembalian satu peminjaman, masa satunya melakukan kontrol pengawasan, ataupun sebaliknya. Lalu kita

sediakan juga satpam yang stand by di pintu lantai 2, ada petugas juga. Jadi saling mengawasi.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antara pengawasan manusia dan pemanfaatan teknologi keamanan. Pengawasan aktif oleh petugas dan satpam didukung oleh teknologi CCTV dan RFID, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada kehadiran fisik petugas, tetapi juga diperkuat dengan sistem pemantauan dan deteksi otomatis. Kolaborasi ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efektif dan berlapis dalam mencegah vandalisme dan pencurian koleksi.

4.1.4. Prosedur Pengamanan Barang Pengunjung

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menerapkan prosedur pengamanan barang pengunjung sebagai salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya pencurian koleksi. Prosedur ini mengatur kewajiban pengunjung untuk menyimpan tas di loker yang telah disediakan sebelum memasuki ruang koleksi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi barang bawaan yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan koleksi perpustakaan.

“Tas harus ditaruh di loker, jadi yang dibawa masuk hanya barang-barang tertentu saja.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Meskipun demikian, perpustakaan masih memberikan toleransi bagi pengunjung untuk membawa barang tertentu, seperti laptop, ke dalam ruang layanan dengan pengawasan petugas. Pengaturan ini dilakukan untuk tetap mendukung kebutuhan pemustaka dalam kegiatan belajar, tanpa mengabaikan aspek keamanan koleksi.

“Tapi barang seperti laptop itu bisa dibawa masuk, karena kita juga menyediakan spot pengecasan jadi barang-barang tertentu saja yang dapat di bawa masuk” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain sebagai upaya pencegahan pencurian koleksi, penerapan sistem loker juga berkaitan dengan pengelolaan barang pengunjung yang tertinggal di area perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan kasus barang pengunjung yang tertinggal di ruang layanan. Dalam kondisi tersebut, petugas akan mengamankan barang yang tertinggal sesuai dengan prosedur yang berlaku hingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

“Di beberapa laporan ditindak lanjuti seperti kehilangan, dan salah penempatan, lalu untuk barang-barang yang hilang atau tertinggal kita juga lakukan penyimpanan” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa sistem loker yang diterapkan cukup efektif dalam mengurangi risiko pencurian koleksi serta memudahkan pengawasan terhadap barang bawaan pengunjung. Prosedur penitipan barang dinilai telah berjalan dengan baik dan mendukung sistem keamanan perpustakaan secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengamanan barang pengunjung melalui sistem loker, pengawasan terhadap barang yang

diperbolehkan dibawa masuk, serta pengelolaan barang tertinggal oleh petugas merupakan bagian penting dari tindakan preventif Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah pencurian koleksi

4.1.5. Edukasi dan Orientasi Pengguna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mengandalkan sistem pengamanan fisik, tetapi juga menerapkan tindakan preventif melalui edukasi dan orientasi pengguna. Edukasi kepada pemustaka dilakukan secara berkelanjutan sejak masa pandemi dan terus dilanjutkan hingga saat ini sebagai upaya membangun kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga koleksi dan mematuhi tata tertib perpustakaan. Bentuk edukasi yang dilakukan meliputi bimbingan pemustaka mengenai tata cara penggunaan layanan dan koleksi perpustakaan, pemanfaatan aplikasi layanan perpustakaan, serta penyebaran informasi terkait aturan dan imbauan melalui media sosial dan pesan langsung. Edukasi ini bertujuan agar pemustaka telah memahami aturan dan tanggung jawabnya sebelum memanfaatkan layanan perpustakaan.

“Kami rutin melakukan bimbingan pemustaka, terutama sejak pandemi, supaya pengguna paham aturan dan cara menggunakan koleksi.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain itu, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga aktif melakukan kegiatan sosialisasi melalui kunjungan ke sekolah dan kampus. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk orientasi awal bagi calon pemustaka, sekaligus untuk memperkenalkan tata tertib dan etika penggunaan koleksi perpustakaan secara bertanggung jawab.

“Edukasi juga kami lakukan lewat aplikasi dan media sosial, jadi pengguna sudah tahu aturan sebelum datang ke perpustakaan.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan orientasi pengguna menjadi bagian penting dari tindakan preventif perpustakaan. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan beragam media penyampaian, perpustakaan berupaya menekan potensi vandalisme dan pencurian koleksi dengan membangun kesadaran serta tanggung jawab pemustaka sejak awal.

4.1.6. Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun berbagai tindakan preventif telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan dalam penerapan sistem keamanan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat pendukung keamanan yang memengaruhi efektivitas pengawasan secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah SDM menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan langsung di seluruh area layanan perpustakaan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua ruang dapat diawasi secara terus-menerus oleh petugas, sehingga pengawasan harus dilakukan secara bergantian dan disesuaikan dengan prioritas area layanan.

“Karena, keterbatasan sumber daya manusia dan kita tidak bisa mengecek satu persatu, apa buku itu sudah di pinjam atau belum, sirkulasi orang masuk itu kan juga banyak, sumber daya manusia kita kan terbatas apalagi pintu kita ada dua.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain itu pustakawan juga mengatakan:

“Jadi di sana itu ada tiga petugas, ketika satu sedang melakukan pengembalian satu peminjaman, masa satunya melakukan kontrol pengawasan, ataupun sebaliknya” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain keterbatasan SDM, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jangkauan kamera CCTV belum mencakup seluruh area perpustakaan, khususnya pada area-area kecil atau sudut tertentu. Keterbatasan jangkauan ini menjadi hambatan dalam pengawasan optimal, sehingga perpustakaan masih harus mengandalkan pengawasan langsung oleh petugas di lapangan.

“CCTV belum menjangkau semua sudut, jadi kami tetap mengandalkan pengawasan petugas di lapangan.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Keterbatasan SDM dan perangkat keamanan tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan kolaborasi antara petugas layanan, satpam, dan teknologi keamanan yang tersedia sebagai upaya untuk tetap menjaga keamanan koleksi secara optimal.

4.1.7. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan yang diterapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengamanan koleksi. Berdasarkan keterangan dari pihak perpustakaan evaluasi tersebut dilaksanakan secara rutin pada awal dan akhir tahun dan dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan serta pengembangan sistem keamanan perpustakaan.

“Evaluasi dilakukan rutin, biasanya di awal dan akhir tahun, supaya sistem keamanan bisa terus diperbaiki.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Selain evaluasi berkala, setiap kejadian kehilangan koleksi maupun barang pengunjung yang tertinggal dicatat dan dilaporkan oleh petugas sebagai bahan evaluasi. Pencatatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem keamanan serta menjadi dasar pengambilan langkah tindak lanjut. Barang pengunjung yang tertinggal di area perpustakaan akan diamankan oleh petugas sesuai dengan prosedur yang berlaku hingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

“Setiap ada laporan kehilangan atau kejadian tertentu, itu kami catat dan jadikan bahan evaluasi.” (Pustakawan, 14 Agustus 2025).

Melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berbasis pada laporan kejadian di lapangan, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan efektivitas sistem keamanan yang

diterapkan. Evaluasi ini menjadi sarana penting untuk meminimalkan risiko terjadinya vandalisme dan pencurian koleksi di masa mendatang, sekaligus memastikan bahwa prosedur pengamanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan berbagai tindakan preventif dalam upaya mencegah vandalisme dan pencurian koleksi melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Pendekatan tersebut mencakup pemanfaatan teknologi keamanan, penerapan kebijakan dan tata tertib perpustakaan, pengaturan akses ruang layanan, serta keterlibatan pustakawan dan petugas keamanan dalam pengawasan aktivitas pemustaka. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan perpustakaan tidak dapat dipahami sebagai upaya teknis semata, melainkan sebagai bagian integral dari manajemen perpustakaan yang berorientasi pada perlindungan koleksi dan keberlanjutan layanan informasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Fatmawati (2010) yang menyatakan bahwa sistem keamanan perpustakaan merupakan suatu perangkat terpadu yang dirancang untuk melindungi koleksi dari ancaman kriminal, baik berupa vandalisme maupun pencurian. Sistem tersebut tidak hanya mencakup penggunaan teknologi keamanan, tetapi juga pengaturan kebijakan, prosedur kerja, serta peran aktif sumber daya manusia. Dengan demikian, penerapan CCTV, RFID, tata tertib perpustakaan, dan pengawasan petugas di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari konsep sistem keamanan terpadu sebagaimana dijelaskan dalam teori.

Lebih jauh, hasil penelitian ini memperkuat konsep keamanan berlapis (*layered security*) yang dikemukakan oleh Silke P. Higgins (2015), yang menjadi teori acuan utama dalam penelitian ini. Higgins (2015) menegaskan bahwa pencegahan vandalisme dan pencurian koleksi tidak dapat mengandalkan satu bentuk pengamanan saja, melainkan harus dilakukan melalui kombinasi berbagai lapisan pengamanan, mulai dari kebijakan institusi, pengamanan fisik, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan peran sumber daya manusia. Dalam konteks Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, konsep ini tercermin dari penggunaan teknologi keamanan yang dikombinasikan dengan pembatasan akses ruang tertentu, pendampingan pengguna, serta pengawasan langsung oleh petugas.

Penerapan CCTV sebagai salah satu bentuk tindakan preventif terbukti relevan dengan teori keamanan perpustakaan. Kumar (2014) menyatakan bahwa CCTV memiliki peran penting dalam mencegah pencurian, mutilasi, dan vandalisme koleksi melalui fungsi monitoring dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan pustakawan menunjukkan bahwa hampir seluruh ruang layanan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dipasang CCTV, yang bertujuan untuk memantau aktivitas pemustaka serta merekam kejadian yang berpotensi melanggar aturan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan sudut pandang di beberapa area, yang menunjukkan bahwa efektivitas CCTV tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh penempatan dan cakupan pengawasan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Erlianti (2018) yang menyatakan bahwa penempatan CCTV pada titik-titik strategis memiliki efektivitas tinggi dalam pengawasan ruang layanan perpustakaan. Selain itu, penelitian internasional oleh Gupta dan Margam (2020) membuktikan bahwa penggunaan CCTV mampu menurunkan tingkat pencurian, kehilangan, dan vandalisme koleksi secara signifikan. Dengan demikian, penerapan CCTV di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat *dikatakan telah sesuai dengan praktik terbaik (best practices) dalam sistem keamanan perpustakaan, meskipun masih memerlukan optimalisasi dari sisi jumlah dan penempatan perangkat*.

Selain CCTV, penggunaan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. RFID digunakan untuk mendeteksi koleksi yang keluar tanpa melalui prosedur peminjaman yang sah, serta mendukung proses inventarisasi dan pelacakan koleksi. Hal ini mendukung pandangan Caldwell-Stone (2010) yang menyatakan bahwa RFID memungkinkan otomatisasi pengawasan keluar-masuk koleksi dan memperkuat kontrol terhadap potensi kehilangan bahan pustaka. Dengan adanya RFID, perpustakaan memiliki lapisan pengamanan tambahan yang bersifat preventif sekaligus represif. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan rekomendasi Ansari dkk. (2021) yang menyebutkan bahwa penerapan RFID merupakan solusi efektif dalam mengurangi kasus *bibliocrime*, khususnya pencurian dan mutilasi koleksi. Dalam kerangka teori Higgins (2015), RFID berfungsi sebagai *deterrent technology*, yaitu teknologi yang mampu memberikan efek pencegah psikologis kepada pemustaka karena meningkatkan risiko terdeteksinya tindakan pelanggaran. Namun demikian, Higgins juga menekankan bahwa teknologi hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan yang konsisten dan pengawasan manusia yang memadai.

Temuan mengenai faktor penyebab kerusakan koleksi, khususnya vandalisme dan pencurian, menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi tantangan utama. Hal ini sejalan dengan teori Sulistyio-Basuki (1991) yang menyatakan bahwa perilaku pengguna yang tidak mematuhi etika penggunaan bahan pustaka dapat menyebabkan kerusakan fisik koleksi, mulai dari coretan hingga kehilangan total. Pandangan ini diperkuat oleh Soeatminah (1992) yang menegaskan bahwa vandalisme sering muncul akibat rendahnya kesadaran pemustaka dalam menghargai koleksi sebagai sumber informasi bersama.

Pernyataan informan pustakawan yang menyebutkan bahwa perilaku vandalisme dan pencurian “kembali ke masyarakat itu sendiri” menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pemustaka masih menjadi faktor dominan. Temuan ini relevan dengan penelitian Amini dkk. (2021) yang menyoroti faktor manusia sebagai elemen paling rentan dalam sistem keamanan informasi dan perpustakaan. Dalam konteks teori Higgins (2015), kondisi ini menunjukkan bahwa lapisan teknologi perlu diperkuat dengan lapisan edukasi dan pengawasan manusia agar sistem keamanan dapat berfungsi secara optimal. Kebijakan pembatasan akses ruang dan koleksi yang diterapkan oleh Perpustakaan Provinsi

Jawa Tengah, seperti pembatasan koleksi referensi untuk dibaca di tempat, pendampingan pengguna saat mengakses koleksi langka, serta penempatan naskah kuno di ruang display, merupakan

bentuk tindakan preventif berbasis kebijakan organisasi. Praktik ini sejalan dengan panduan pelestarian koleksi

yang dikeluarkan oleh IFLA (1999) yang menekankan pentingnya pengendalian akses terhadap koleksi bernilai tinggi dan berisiko tinggi mengalami kerusakan atau kehilangan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai lapisan pengamanan non-teknologis yang melengkapi sistem keamanan elektronik. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Yusrawati (2022) yang menyatakan bahwa pembatasan akses dan pengawasan ketat terhadap koleksi khusus merupakan strategi efektif untuk meminimalkan risiko vandalisme dan pencurian. Dalam perspektif Higgins (2015), kebijakan akses ruang merupakan bagian dari lapisan kebijakan institusi yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan perpustakaan yang aman dan terkendali.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam penerapan sistem keamanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jumlah CCTV yang belum ideal, serta rendahnya kesadaran pemustaka. Temuan ini sejalan dengan pandangan Cravey (2001) yang menyatakan bahwa transformasi perpustakaan menjadi ruang yang lebih terbuka dan ramah pengguna meningkatkan kompleksitas pengawasan dan risiko pencurian. Selain itu, penelitian Kavak (2024) menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kompetensi staf memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan efektivitas pengawasan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tindakan preventif yang diterapkan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan teori keamanan perpustakaan dan praktik terbaik yang dikemukakan dalam berbagai penelitian terdahulu. Konsep keamanan berlapis menurut Higgins (2015) terbukti relevan dalam menjelaskan bagaimana kombinasi teknologi, kebijakan, dan peran sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam mencegah vandalisme dan pencurian koleksi. Meskipun demikian, efektivitas sistem keamanan masih dipengaruhi oleh faktor manusia dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan sistem keamanan secara berkelanjutan melalui optimalisasi teknologi, peningkatan kompetensi staf, serta edukasi pemustaka.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tindakan Preventif Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Mencegah Vandalisme dan Pencurian Koleksi, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk menjaga keamanan koleksi melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan pengawasan langsung. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melindungi aset pengetahuan dari berbagai bentuk kerusakan yang disebabkan oleh perilaku pemustaka, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Vandalisme menjadi bentuk kerusakan koleksi yang paling sering ditemukan, berupa coretan, lipatan halaman, hingga robekan pada buku. Tindakan ini terjadi karena tingkat kesadaran sebagian pemustaka yang masih rendah dalam menjaga fasilitas perpustakaan. Meski demikian, kasus pencurian

juga tercatat terjadi, namun jumlahnya tidak sebanyak kasus vandalisme. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan yang telah diterapkan, terutama melalui sistem keamanan berbasis teknologi, mampu menekan kejadian pencurian secara efektif. Penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem

RFID merupakan komponen utama dalam upaya preventif perpustakaan. CCTV yang ditempatkan di berbagai titik ruangan berfungsi sebagai alat pemantau sekaligus *deterrent* yang mengurangi potensi tindakan menyimpang. Sementara itu, sistem RFID yang terintegrasi dengan alarm gate terbukti efektif dalam mendeteksi koleksi yang keluar tanpa melalui prosedur peminjaman. Keberadaan teknologi ini memperkuat fungsi pengawasan dan membantu petugas dalam meminimalkan kehilangan koleksi secara lebih akurat dan efisien. Selain teknologi, perpustakaan juga menerapkan kebijakan tata tertib dan pengelolaan ruang yang ketat. Larangan membawa tas ke ruang koleksi, kewajiban menyimpan barang di loker, serta pemasangan papan imbauan di area layanan menjadi bentuk edukasi non-teknis bagi pemustaka. Kebijakan ini dikombinasikan dengan pengawasan langsung oleh pustakawan dan satpam, yang secara aktif melakukan pemantauan di ruang baca dan rak koleksi. Bentuk pengawasan manusia ini masih menjadi aspek penting dalam mencegah vandalisme, karena kerusakan banyak terjadi saat pemustaka tidak diawasi secara langsung.

Perpustakaan juga menerapkan sistem pembatasan akses pada ruang dan koleksi tertentu, seperti ruang referensi, ruang koleksi kuno, serta koleksi koran lama. Pembatasan ini dilakukan melalui aturan tidak dapat dipinjam, penyediaan ruang display khusus, serta pendampingan oleh petugas saat koleksi digunakan. Hal ini menandakan bahwa perpustakaan berhasil menerapkan manajemen risiko sesuai karakteristik setiap jenis koleksi, sehingga keamanan material dapat lebih terjamin. Meskipun berbagai tindakan preventif telah dijalankan, perpustakaan masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pencegahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan CCTV yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran sebagian pemustaka. Namun demikian, perpustakaan secara intensif melakukan evaluasi rutin setiap awal dan akhir tahun untuk menilai efektivitas sistem keamanan, memperbaiki sarana pendukung, dan meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan. Secara keseluruhan, tindakan preventif yang dilaksanakan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menekan risiko vandalisme dan pencurian koleksi. Kombinasi antara teknologi, peraturan, dan pengawasan langsung telah menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi dan adaptif. Melalui evaluasi berkelanjutan, perpustakaan mampu meningkatkan kualitas perlindungan koleksi sehingga layanan informasi dapat tetap tersedia secara optimal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pemustaka.

Daftar Pustaka

- Aina, L. O., Ajiferuke, I., & Bokhare, M. R. (2016). Effects of pests on library collections: A study of selected libraries. *International Insight on Library & Information Science and Technology*, 2(7), 52–58.

- Amini, M., Vakilimofrad, H., & Saberi, M. K. (2021). Human factors affecting information security in libraries. *The Bottom Line*, 34(1), 45–67. <https://doi.org/10.1108/BL-04-2020-0029>
- Barokah, F., & Azhar, A. A. (2024). Mengubah tantangan menjadi peluang: Upaya pustakawan menyelamatkan buku akibat vandalisme. *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 12(2). <https://doi.org/10.18592/pk.v12i2.14068>
- Ceccato, V., Ercin, E., Hazanov, J., Elfström, S., & Sampaio, A. (2023). Safety in a public library: The perspective of visitors and staff. *Library Management*, 44(3–4), 229–245. <https://doi.org/10.1108/LM-12-2022-0127>
- Daryono. (2023). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan vandalisme koleksi perpustakaan dan upaya pencegahannya. *Media Pustakawan*, 17(1–2). <https://doi.org/10.37014/medpus.v17i1%262.866>
- Erlianti, G. (2018). Security system for collection in library. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 263, 5644–5648.
- Fatmawati, E. (2018). Identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan koleksi perpustakaan. *EduLib*, 7(2), 108–119. <https://doi.org/10.17509/edulib.v7i2.9722>
- Gupta, P., & Margam, M. (2020). CCTV as an efficient surveillance system? An assessment from 24 academic libraries of India. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 70(4–5), 355–376. <https://doi.org/10.1108/GKMC-04-2020-0052>
- Higgins, S. P. (2015). Theft and vandalism of books, manuscripts, and related materials in public and academic libraries, archives, and special collections. *Library Philosophy and Practice*, 1256.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Indah, R. (2023). Qualitative interview with sensitive participants. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.22146/jpki.64308>
- Kavak, A. (2024). Impact of information security awareness on information security compliance of academic library staff in Türkiye. *Journal of Academic Librarianship*, 50(5), 102937. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102937>
- Nilamsari, N. (2022). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 143–153. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Yuliana, L., Purwaka, & Sa'diyah, L. (2020). Peran pustakawan dalam menanggulangi *bibliocrime* terhadap koleksi anak. *Libraria: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 8(1), 45–58.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Yusrawati, Y. (2022). Sistem keamanan koleksi dalam mencegah vandalisme di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *JIPIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.31958/jipis.v1i1.5939>